



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa di Nagari Lingsuang Aua

Jayanti Armida Sari

Universitas Terbuka, Indonesia

*Email Corresponding: jayanti@ecampus.ut.ac.id

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 15 Februari 2026

Revised date: 15 Maret 2026

Accepted date: 26 April 2026

DOI:

<https://doi.org/10.33005/jdg.v16i1.5668>

Village Funds represent an important fiscal policy instrument designed to accelerate rural development and improve community welfare. This study analyzes the effectiveness of village funds in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Nagari Lingsuang Aua. This study employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews and participatory observation involving village officials and community members who directly experience or manage Village Fund programs. The findings indicate that the Village Funds have contributed positively to several aspects of development. In the infrastructure sector, the funds have improved accessibility and mobility through the construction and improvement of roads and public facilities, supporting SDG 9. Village Funds support community-based health services in the health sector, such as posyandu, contributing to SDG 3. Meanwhile, economic empowerment programs, including small business support and food security initiatives, increase household income and support SDGs 1 and 8. However, several challenges remain, particularly limited community participation in planning processes and the managerial capacity of village officials. Therefore, strengthening participatory governance and improving administrative capacity are essential to maximize the impact of village funds in achieving SDGs at the village level.

Keyword: Community Economic Empowerment; Rural Healthcare Services; Rural Infrastructure Development; Sustainable Development Goals (SDGs); Village Fund



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International Licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRAKSI

Dana Desa merupakan instrumen kebijakan fiskal yang penting untuk mempercepat pembangunan pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan Dana Desa dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Nagari Lingsuang Aua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap perangkat nagari serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan maupun penerimaan manfaat program Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa memberikan kontribusi positif terhadap beberapa aspek pembangunan. Dalam bidang infrastruktur, Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan serta fasilitas umum yang meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, sejalan dengan tujuan SDGs nomor 9. Dalam bidang kesehatan, Dana Desa mendukung layanan kesehatan berbasis masyarakat seperti kegiatan posyandu, yang berkontribusi pada pencapaian SDGs nomor 3. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan usaha kecil dan program ketahanan pangan turut meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga mendukung pencapaian SDGs nomor 1 dan 8. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan program serta keterbatasan kapasitas manajemen pemerintah desa. Oleh karena itu, penguatan tata kelola partisipatif dan peningkatan kapasitas aparatur desa diperlukan untuk memaksimalkan dampak Dana Desa dalam mendukung pencapaian SDGs di tingkat desa.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; Layanan Kesehatan Pedesaan; Pembangunan Infrastruktur Pedesaan; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); Dana Desa.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan landasan hukum bagi alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan di tingkat desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan (Reginaldis et al., 2024). Selanjutnya, penggunaan dana desa diarahkan untuk berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), penggunaan dana desa harus sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup 17 tujuan utama, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020).

Penggunaan dana desa yang efektif sangat bergantung pada tata kelola yang baik, partisipasi aktif masyarakat, dan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut. Good governance atau tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Menurut Khoirunurrofik et al. (2021), tata kelola dana desa yang baik dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dalam mencapai SDGs. Selain itu, Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan program pembangunan, termasuk dalam konteks implementasi Dana Desa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa (Kamuli et al., 2023). Keterlibatan aktif dari warga desa memastikan bahwa program-program yang dirancang dan dilaksanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab di antara masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberlanjutan program tersebut.

Salah satu tujuan utama dari SDGs adalah pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan di tingkat desa dapat dicapai melalui berbagai program yang didanai oleh dana desa, seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Menurut Salim (2022), program pemberdayaan ekonomi yang didanai oleh dana desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain pengentasan kemiskinan, tujuan SDGs lainnya adalah peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi, dan mengadakan program pelatihan bagi guru. Studi oleh Hugo et al. (2019) menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk program pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di desa-desa terpencil.

Kesehatan juga merupakan salah satu aspek penting dalam SDGs. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dana desa dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, menyediakan obat-obatan, dan mengadakan program kesehatan seperti posyandu dan penyuluhan kesehatan. Menurut penelitian oleh Hidayat dan Nuraini (2019), penggunaan dana desa untuk program kesehatan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di desa (Marhaeni et al., 2023). Selain aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, SDGs juga mencakup tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan di tingkat desa dapat dicapai melalui berbagai program yang didanai oleh dana desa, seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya air. Menurut Pangkey et al. (2023), penggunaan dana desa untuk program lingkungan dapat membantu desa dalam menjaga kelestarian alam dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Meskipun terdapat banyak penelitian yang membahas efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung berbagai aspek pembangunan di desa, masih terdapat beberapa celah dalam literatur yang perlu diisi. Pertama, sebagian besar penelitian lebih fokus pada evaluasi penggunaan dana desa secara umum tanpa

melihat spesifikasinya dalam konteks pencapaian SDGs di tingkat desa. Misalnya, meskipun ada desa yang berhasil memanfaatkan Dana Desa secara optimal, banyak desa lainnya menghadapi kendala seperti kurangnya transparansi dan rendahnya akuntabilitas (Bili et al., 2024), keterbatasan kapasitas manajemen (Diamantina, 2017), dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana (Hendrianto, 2019). Kedua, penelitian yang ada sering kali tidak memberikan perhatian yang cukup pada aspek partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Studi oleh Susilowati et al. (2018) menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang menghubungkan partisipasi ini dengan pencapaian SDGs secara spesifik.

Sumatera Barat, dengan sistem pemerintahan nagari yang unik, memberikan konteks yang menarik untuk mengkaji efektivitas penggunaan dana desa dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Nagari Lingkuang Aua, sebagai salah satu penerima alokasi dana desa, menghadapi tantangan dan peluang yang khas dalam pengelolaan dana tersebut. Sistem pemerintahan nagari, yang memiliki otonomi tersendiri, memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan program-program pembangunan. Dengan kekuatan adat dan kearifan lokal yang kuat, nagari mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan tujuan pembangunan modern, menciptakan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menyoroti pentingnya adaptasi dan inovasi dalam konteks lokal untuk mencapai tujuan pembangunan global.

Studi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Nagari Lingkuang Aua, yang merupakan agenda global dengan 17 tujuan utama untuk pembangunan berkelanjutan. Penggunaan Dana Desa yang efektif dapat mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan pembangunan infrastruktur yang layak, yang semuanya sejalan dengan tujuan SDGs. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya tata kelola yang baik, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, serta mengidentifikasi kendala dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas manajemen pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa dan memberikan kontribusi terhadap literatur akademik mengenai desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan desa di Indonesia dan mendukung pencapaian SDGs di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh gambaran yang mendalam mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Nagari Lingkuang Aua. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pengalaman dan persepsi berbagai aktor yang terlibat, baik sebagai pengambil kebijakan maupun penerima manfaat program.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan terhadap dua kelompok informan utama, yaitu pemangku kebijakan (wali nagari dan perangkat nagari) yang terlibat langsung dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Desa, serta kelompok penerima manfaat yang terdiri atas masyarakat penerima BLT, kelompok usaha ketahanan pangan, dan warga yang memanfaatkan infrastruktur desa. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria keterlibatan langsung dalam pengelolaan atau penerimaan manfaat Dana Desa serta pengetahuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Jumlah informan ditentukan hingga mencapai titik kejenuhan data (*data saturation*), yaitu ketika wawancara tambahan tidak lagi memberikan informasi baru yang signifikan.

Selain wawancara, observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati pelaksanaan program Dana Desa, seperti pembangunan infrastruktur, kegiatan posyandu, serta pengelolaan program ketahanan pangan. Observasi ini bertujuan untuk memvalidasi informasi hasil wawancara sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai implementasi Dana Desa di lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi resmi,

seperti laporan penggunaan Dana Desa, laporan keuangan desa, dokumen perencanaan pembangunan (RPJMDes dan RKPDes), serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, seperti data consideration, data display, drawing, and verifying conclusions sampling (Miles et al., 2014). Data Consideration mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, atau mentransformasikan data yang diperoleh dari transkrip wawancara dengan tujuan memperkuat data yang didapatkan. Tahap kedua adalah Displaying Data, yaitu mengorganisir informasi yang diperoleh agar mudah dianalisis untuk penarikan kesimpulan atau tindakan selanjutnya. Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi hasilnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang strategis dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedesaan di Indonesia. Program ini dirancang untuk memperkuat kemandirian desa melalui peningkatan kapasitas pembangunan, pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kesenjangan pembangunan antara wilayah desa dan perkotaan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tingkat desa. Melalui alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Desa digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, penguatan sektor ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan program pemberdayaan masyarakat.

Dalam praktiknya, pemanfaatan Dana Desa diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh masyarakat pedesaan, termasuk kemiskinan, keterbatasan akses terhadap layanan publik, serta rendahnya kualitas infrastruktur dasar. Berbagai program yang didanai oleh Dana Desa berkontribusi langsung terhadap pencapaian beberapa tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang inklusif, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai contoh, program Dana Desa terbukti berperan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Nagari Lingsuang Aua melalui berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi dan dukungan terhadap usaha masyarakat (Sari et al., 2025). Selain itu, di berbagai wilayah lain di Indonesia, Dana Desa juga dimanfaatkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi yang layak, serta layanan kesehatan dasar. Program-program tersebut memiliki kontribusi penting dalam menurunkan angka stunting serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan secara keseluruhan (Indra & Khoirunrofik, 2022; Lestari et al., 2023).

Implementasi SDGs pada tingkat desa memberikan ruang bagi pendekatan pembangunan yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal. Setiap desa memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda, sehingga strategi pembangunan yang diterapkan perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi lokal yang ada. Dalam hal ini, desa memiliki peluang untuk merancang program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui proses perencanaan partisipatif. Kolaborasi antara pemerintah desa dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga pemerintah pusat, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat setempat, menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi program pembangunan desa. Melalui kerja sama yang sinergis tersebut, tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai secara lebih efektif, efisien, dan inklusif.

Selain itu, implementasi SDGs di tingkat desa juga membuka peluang bagi munculnya berbagai inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa. Desa dapat mengembangkan berbagai program kreatif yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Inovasi tersebut dapat berupa pengembangan usaha ekonomi lokal, penguatan peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), pengelolaan ketahanan pangan berbasis masyarakat, hingga program pengelolaan

lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong transformasi pembangunan desa menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Permatasari et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Lingkuang Aua, pemanfaatan Dana Desa menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan yang mendukung pencapaian SDGs di tingkat lokal. Program-program yang didanai melalui Dana Desa tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, dalam proses implementasinya masih ditemukan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan agar efektivitas penggunaan Dana Desa dapat terus ditingkatkan. Hasil penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek utama yang menjadi fokus pemanfaatan Dana Desa di Nagari Lingkuang Aua, yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketiga aspek tersebut merupakan sektor penting yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian berbagai tujuan dalam SDGs Desa.

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Nagari Lingkuang Aua melalui penggunaan Dana Desa telah memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana Desa dimanfaatkan untuk membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum lain yang menunjang mobilitas masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan perangkat nagari dan masyarakat, indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari meningkatnya kelancaran distribusi hasil pertanian, berkurangnya waktu tempuh ke fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta adanya peningkatan akses masyarakat terhadap sarana keagamaan dan sosial. Misalnya, pembangunan jalan beton dan penimbunan jalan di Jorong Katimaha mempermudah akses warga ke pasar dan sekolah, sementara pembangunan penahan tebing dan saluran air ke mushola meningkatkan keamanan lingkungan dan kenyamanan aktivitas ibadah

Selain itu, manfaat infrastruktur juga dirasakan secara langsung oleh penerima BLT yang mengaku lebih mudah menjual hasil kebun atau mengakses layanan kesehatan setelah jalan diperbaiki. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs nomor 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), yang menekankan pembangunan infrastruktur inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, indikator pembangunan infrastruktur di nagari ini tidak hanya berupa penyediaan sarana fisik, tetapi juga dampak fungsional terhadap kehidupan masyarakat, seperti peningkatan mobilitas, pengurangan beban ekonomi keluarga, dan terciptanya rasa aman.

SudStudi di Desa Botto Mallangga menunjukkan bahwa manajemen dana desa berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan hasil statistik yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara kualitas layanan dan pengelolaan dana desa dengan kesejahteraan komunitas (Nur Rezki Amalia et al., 2024). Penelitian di Desa Nafri juga menunjukkan bahwa dana desa digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan dan pasar, yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan kapasitas institusi desa (Safkaur, 2024).

Selain itu, kebijakan alokasi dana desa di Kabupaten Semangga memperlihatkan bahwa meskipun ada manfaat nyata, komunikasi yang lebih efektif dan komitmen sumber daya manusia diperlukan untuk mencapai kemandirian desa (Reginaldis et al., 2024). Penelitian di Desa Salletto juga mendukung efektivitas dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur melalui pengelolaan yang baik dan evaluasi yang terus menerus (Nurfady et al., 2023). Terakhir, penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lebak menunjukkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat meski ada tantangan selama pandemi COVID-19 (Racmat, 2023).

Peningkatan Layanan Kesehatan

Dana Desa di Nagari Lingkuang Aua dimanfaatkan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, menyediakan obat-obatan, serta mendukung program kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu. Hasil wawancara dengan perangkat nagari dan masyarakat menunjukkan bahwa indikator keberhasilan program kesehatan antara lain meningkatnya kehadiran balita dan ibu hamil di posyandu, tersedianya layanan

imunisasi secara rutin, serta berkurangnya keluhan masyarakat terkait keterbatasan obat-obatan di puskesmas pembantu. Selain itu, dukungan Dana Desa mempermudah pengadaan alat timbang balita, vitamin, serta transportasi untuk kegiatan penyuluhan kesehatan. Dengan demikian, kontribusi Dana Desa dalam bidang kesehatan dapat meningkatkan fungsi layanan kesehatan preventif dan promotif. Temuan ini sejalan dengan tujuan SDGs nomor 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) yang menekankan peningkatan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat pedesaan.

Temuan Khusaini et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa untuk sektor kesehatan terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian lain di Jawa Timur selama pandemi COVID-19 menemukan bahwa meskipun tidak ada korelasi statistik yang signifikan, perhatian terhadap masalah gizi dan penggunaan dana desa untuk kesehatan harus menjadi perhatian penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat (Handayani & Firdausi, 2022). Selain itu, penggunaan dana desa selama pandemi di Kabupaten Klungkung menunjukkan bahwa prioritas alokasi dana untuk penanganan COVID-19 berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat desa (Marhaeni et al., 2023). Penelitian di Kabupaten Lebak juga menunjukkan bahwa manajemen dana desa yang baik berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesejahteraan komunitas (Viverita et al., 2022). Terakhir, studi di Kecamatan Mlarak menunjukkan bahwa realisasi penggunaan dana desa berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan (Wahyuningsih et al., 2023).

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program pemberdayaan ekonomi yang didanai Dana Desa di Nagari Lingkuang Aua tidak hanya berbentuk pelatihan keterampilan, tetapi juga pemberian bantuan modal usaha serta pengembangan program ketahanan pangan berbasis budidaya ikan. Hasil wawancara dengan pengelola program menunjukkan indikator keberhasilan antara lain jumlah rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan usaha, tingkat keberhasilan budidaya ikan dengan angka kematian bibit rendah, serta adanya pembagian hasil panen yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Beberapa penerima manfaat juga menyampaikan bahwa Dana Desa membantu membuka peluang usaha kecil seperti laundry rumah tangga atau warung sembako, meskipun dengan skala terbatas.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perawatan kolam ikan dan pengelolaan usaha desa menjadi indikator partisipasi aktif, yang menunjukkan bahwa program tidak hanya berorientasi pada bantuan sesaat tetapi juga menciptakan kesempatan kerja lokal dan potensi keberlanjutan ekonomi desa melalui BUMNag. Walaupun terdapat kendala seperti keterbatasan modal tambahan dan kualitas sarana produksi, program ini tetap memberikan dampak nyata dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi kerentanan ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi melalui Dana Desa di Nagari Lingkuang Aua secara langsung mendukung pencapaian SDGs nomor 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs nomor 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Studi mengenai efektivitas Dana Desa dalam mengentaskan kemiskinan menunjukkan hasil yang beragam, tergantung pada alokasi dan implementasi dana di berbagai daerah. Penelitian di Desa Taeng menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa untuk infrastruktur dan pelatihan pemberdayaan perempuan berhasil membantu mengentaskan kemiskinan dan mendukung SDGs Desa (Mutmainna et al., 2023). Sebaliknya, studi mengenai efektivitas Dana Desa dalam mengentaskan kemiskinan menunjukkan hasil yang beragam, tergantung pada alokasi dan implementasi dana di berbagai daerah. Penelitian di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa belum efektif dalam mengurangi kemiskinan di sebagian besar kabupaten/kota, dengan hanya beberapa daerah yang menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin (Guswandi & Amelia, 2023). Di Jawa Timur, penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa secara signifikan mengurangi kemiskinan namun tidak berpengaruh pada ketimpangan (Suseno et al., 2023).

Tantangan Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Mewujudkan SDGs di Nagari Lingkuang Aua

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa telah memberikan berbagai dampak positif terhadap pembangunan di Nagari Lingkuang Aua, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat nagari. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan program pembangunan, serta keterbatasan kapasitas manajerial pemerintah desa dalam pengelolaan, administrasi, dan evaluasi program Dana Desa secara optimal.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program Dana Desa di Nagari Lingkuang Aua masih belum maksimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa musyawarah nagari cenderung didominasi oleh perangkat desa dan lembaga formal, sementara sebagian masyarakat hanya berperan sebagai penerima manfaat. Warga mengaku sering hanya mendapatkan informasi setelah keputusan diambil, bukan dilibatkan sejak tahap perencanaan. Hal ini membuat sebagian program dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, misalnya soal pemerataan BLT atau prioritas pembangunan jalan lingkungan.

Indikator lemahnya partisipasi terlihat dari minimnya kehadiran masyarakat umum dalam musyawarah nagari, keterbatasan ruang aspirasi bagi kelompok rentan, serta adanya keluhan terkait kurangnya transparansi dalam penentuan penerima bantuan. Meskipun begitu, ada indikasi positif berupa keterlibatan masyarakat dalam tahap implementasi, seperti gotong royong pembangunan jalan dan pemeliharaan kolam ikan program ketahanan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan partisipasi lebih dominan pada tahap perencanaan, bukan pada pelaksanaan. Dengan demikian, peningkatan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi menjadi penting agar penggunaan Dana Desa lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana ditekankan dalam tujuan SDGs.

Studi dari Mulyan & Martoni (2024) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk keberhasilan program pembangunan desa. Studi kasus di Desa Garessi menekankan bahwa pendidikan, pelatihan, dan pembentukan kelompok kerja adalah strategi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal (Rasda et al., 2024). Selain itu, partisipasi masyarakat terkait erat dengan tujuan SDGs nomor 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan). SDGs ini menekankan pentingnya inklusivitas, keamanan, ketahanan, dan keberlanjutan pemukiman manusia. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, desa dapat memastikan bahwa proyek pembangunan tidak hanya memenuhi standar teknis tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat berpartisipasi aktif, hasil proyek menjadi lebih relevan dan bermanfaat bagi komunitas tersebut, serta meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif (Permatasari et al., 2021).

Kapasitas Manajemen Pemerintah Desa

Kapasitas manajemen pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas pencapaian SDGs di Nagari Lingkuang Aua. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian perangkat desa masih menghadapi kendala dalam aspek perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan, terutama terkait penggunaan aplikasi berbasis digital serta penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai regulasi. Beberapa aparat desa mengakui perlunya pendampingan teknis dan pelatihan berkelanjutan dalam manajemen keuangan dan penyusunan dokumen perencanaan agar pelaksanaan program tidak hanya administratif, tetapi juga berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Indikator keterbatasan kapasitas terlihat dari adanya ketidaksesuaian data antara dokumen resmi dan kondisi lapangan, keterlambatan pencairan anggaran akibat kelengkapan administrasi, serta masih rendahnya kemampuan perangkat desa dalam melakukan evaluasi program secara sistematis. Meski demikian, ada

perkembangan positif berupa upaya pemerintah desa untuk melibatkan pendamping desa dalam penyusunan dokumen serta melakukan konsultasi rutin dengan kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kapasitas manajemen masih menjadi tantangan, terdapat potensi peningkatan jika program pelatihan, pendampingan, dan penguatan SDM desa dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, peningkatan kapasitas manajemen pemerintah desa melalui pelatihan teknis, supervisi berjenjang, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan desa yang lebih adaptif merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa dan mendukung tercapainya target SDGs di tingkat nagari.

Pelatihan yang memadai dan pendampingan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perangkat desa dapat mengelola dana dengan efektif dan efisien, serta mematuhi regulasi yang berlaku (Lestari et al., 2023; Permatasari et al., 2021). Penguatan kapasitas ini mendukung tujuan SDGs nomor 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pelatihan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis dalam manajemen keuangan tetapi juga memperkuat kemampuan administratif dan perencanaan strategis. Penelitian menunjukkan bahwa desa-desa dengan manajemen yang lebih baik cenderung memiliki proyek-proyek yang lebih sukses dan berkelanjutan. Pengembangan kapasitas juga membantu dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Indra & Khoirunurrofik, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa memainkan peran penting dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) di Nagari Lingsuang Aua, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya telah mendukung mobilitas dan akses masyarakat terhadap berbagai layanan, sejalan dengan tujuan SDGs nomor 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Peningkatan layanan kesehatan melalui penggunaan Dana Desa telah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Nagari Lingsuang Aua, mendukung tujuan SDGs nomor 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan). Program kesehatan seperti posyandu dan penyuluhan kesehatan terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi yang didanai oleh Dana Desa telah meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan, mendukung tujuan SDGs nomor 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs nomor 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Meskipun penelitian ini menunjukkan dampak positif, beberapa tantangan masih perlu diatasi, seperti partisipasi masyarakat yang masih rendah dan kapasitas manajemen pemerintah desa yang terbatas.

REFERENCES

- Bili, M., Yohanes, S., & Lamataro, C. (2024). Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(2), 258–269. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1807>
- Diamantina, A. (2017). No Title. *Diponegoro Law Review; Vol 2, No 1 (2017): Diponegoro Law Review April 2017DO - 10.14710/Dilrev.2.1.2017.203-226* . <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15335>
- Guswandi, G., & Amelia, S. (2023). Spatial diversity of Village Funds in reducing Poverty in West Sumatra Province. *TATALOKA; Vol 25, No 3 (2023): Volume 25 No. 3 August 2023DO - 10.14710/Tataloka.25.3.165-180* . <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/tataloka/article/view/11925>
- Handayani, D., & Firdausi, N. J. (2022). The village fund utilization and its implication for public health improvement in the pandemic era. *Bali Medical Journal*, 11(2), 702–705. <https://doi.org/10.15562/bmj.v11i2.3140>

- Hendrianto, W. (2019). Improving the effectiveness of community participation in village fund program. *Bappenas Working Papers*, 2(2), 215–222. <https://doi.org/10.47266/bwp.v2i2.41>
- Hugo, A. S., Sigit, W., & Mohammad, R. (2019). *The Village Fund Allocation: the Evaluation and Progression Program of Government BT - Proceedings of the 1st International Conference on Education and Social Science Research (ICESRE 2018)*. 131–134. <https://doi.org/10.2991/icesre-18.2019.27>
- Indra, J., & Khoirunurrofik, K. (2022). Understanding the role of village fund and administrative capacity in stunting reduction: Empirical evidence from Indonesia. *PloS One*, 17(1), e0262743. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262743>
- Kamuli, S., Wantu, S. M., Hamim, U., Djafar, L., Sahi, Y., & Dahiba, H. (2023). Pemberdayaan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan Dana Desa Bagi Masyarakat Pesisir di Desa Momalia Kecamatan Posigadan Provinsi Sulawesi Utara. *Jambura Journal Civic Education*, 3(2). <https://doi.org/10.37905/jacedu.v3i2.21827>
- Khoirunurrofik, K., Kurniawan, Y. R., & Wiguna, G. E. (2021). Reformulasi dana desa untuk mewujudkan transfer berbasis kinerja: Momentum peningkatan peran di masa pandemi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 43–56. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.278>
- Khusaini, K., Bastian, A. F., Latuconsina, H., & Pratama, R. (2023). Boosting the quality of life through additional general allocation funds for village infrastructure development. *International Journal of Public Health Science*, 12(1), 348–360. <https://doi.org/10.11591/ijphs.v12i1.21860>
- Lestari, R. I., Wardono, B., Saptana, S., Wardhana, I. W., Indarto, I., & Budiati, Y. (2023). The Village Fund Program and Indonesia's 18 th Sustainable Development Goal: A Bibliometric and Content Study. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 18(11). <https://doi.org/10.18280/ijstdp.181115>
- Marhaeni, A. A. I. N., Sudibia, I. K., Andika, G., & Fahlevi, M. (2023). The utilization of village funds during the Covid-19 pandemic and the impact on community welfare in Klungkung Regency. *Technium Sustainability*, 3(SE-Articles), 91–103. <https://doi.org/10.47577/sustainability.v3i.9160>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (Third Edit). SAGE Publications, Inc.
- Mulyan, A., & Martoni, A. (2024). Community Participation in Village Tourism Development. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(3), 120–132. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i3.5559>
- Mutmainna, M., Mar'ah, K., & Sadli, L. E. (2023). Strategy for utilizing village fund budget to alleviate poverty towards village SDGs in Taeng Village Gowa Regency. *International Journal of Social Service and Research*, 3(4), 975–982. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.328>
- Nur Rezki Amalia, Wa Ode Rayyani, & Alamsjah, A. (2024). The influence of village fund management on the welfare of the community of Botto Mallangga Village, Maiwa District Enrekang District. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 2(3), 851–857. <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v2i3.135>
- Nurfady, M. R., Heryati, Y., & Mudo, M. (2023). Effectiveness of Village Fund Management in Economic and Infrastructure Development. *Journal La Bisecoman*, 4(6), 112–118. <https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v4i6.833>
- Pangkey, G. L., Waney, N. F. L., & Kaunang, R. (2023). Penggunaan Dana Desa dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tounalet I Kecamatan Sonder (Use of Village Funds in Community Empowerment Programs in Tounalet I Village, Sonder District). *Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Pedesaan)*, 5(1), 13–21. <https://doi.org/10.35791/agrirud.v5i1.47698>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (2020).
- Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals. In *Sustainability* (Vol. 13, Issue 21). <https://doi.org/10.3390/su132112294>

- Racmat, D. R. R. (2023). Implementation of Village Fund Assistance in Village Development and Progress in Lebak Regency. *International Journal of Social Sciences Review*, 4(2 SE-Articles), 55–67. <https://doi.org/10.57266/ijssr.v4i2.131>
- Rasda, M., Hasan, K., & Muhammad, M. (2024). Village Government Strategies to Enhance Community Participation In Development: A Case Study in Garessi Village, Tanete Rilau District, Barru Regency. *International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, 4(1 SE-Articles), 188–202. <https://doi.org/10.52121/ijessm.v4i1.233>
- Reginaldis, M. M., Supriyono, B., Setyowati, E., & Amin, F. (2024). Implementation of Village Fund Allocation Policy to Realize Village Self-Reliance. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(5), e06651. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n5-131>
- Safkaur, T. L. (2024). Implementation of Village Funds for Infrastructure Development in Nafri Village, Abepura District, and Jayapura City. *Journal of Social Science*, 5(1), 14–22. <https://doi.org/10.46799/jss.v5i1.743>
- Salim, A. (2022). The Effect of Village Community Economic Empowerment on Poverty Reduction in Rantau Bayur District of Banyuasin Regency. *Nusantara Journal of Behavioral and Social Sciences*, 1(2), 49–56. <https://doi.org/10.47679/20229>
- Sari, J. A., Sunarya, A., & Darmanto. (2025). The role of the village fund program in alleviating poverty in rural areas. *Dirasat: Human and Social Sciences*, 52(3), 7096. <https://doi.org/10.35516/hum.v52i3.7096>
- Suseno, V. P., Syafitri, W., & Bintoro, N. S. (2023). Does Village Fund Reduce Poverty and Disparity in East Java Province?(Evidence from Indonesia). *Journal of International Conference Proceedings*, 6(1), 501–512. <https://doi.org/10.32535/jicp.v6i3.2433>
- Susilowati, N., Herdiani, A., & Widhiastuti, R. (2018). Village Community Participation Model in Village Funds Management to Exteriorize the Accountability. *KnE Social Sciences*, 1024–1038. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3190>
- Viverita, V., Astuti, R. D., Martdianty, F., & Kusumastuti, R. D. (2022). Village fund management, quality of life and community wellbeing: evidence from Lebak Regency, Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(3). <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.3.38>
- Wahyuningsih, R., Santoso, S., & Hamidah, C. (2023). Realization of Village Fund Utilization to Improve Welfare of Village Communities In Mlarak District, Ponorogo Regency In 2022. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 3(1), 168–179. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i1.723>